

KONSEP DASAR **IPS**

di Sekolah Dasar



Dr. Sinta Maria Dewi, M.Pd.

KONSEP DASAR IPS DI SEKOLAH DASAR

Dr. Sinta Maria Dewi, M.Pd.



KONSEP DASAR IPS DI SEKOLAH DASAR

Penulis:
Dr. Sinta Maria Dewi, M.Pd.

Editor:
Syifa Ismayanti

Layouter :
Tim Kreatif PRCI

Cover:
Rusli

Cetakan Pertama : April 2025

Hak Cipta 2025, pada Penulis. Diterbitkan pertama kali oleh:

Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
ANGGOTA IKAPI JAWA BARAT

Pondok Karisma Residence Jalan Raflesia VI D.151
Panglayungan, Cipedes Tasikmalaya – 085223186009

Website : www.rcipress.rcipublisher.org
E-mail : rumahcemerlangindonesia@gmail.com

Copyright © 2025 by Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
All Right Reserved

- Cet. I – : Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2025
; 18 x 25 cm
ISBN

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk dan dengan
cara apapun tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang
Hak Cipta Pasal 72

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, atas karunia, hidayah, dan pertolongan-Nya sehingga buku *Konsep Dasar IPS di Sekolah Dasar* dapat berada di tangan para pembaca yang budiman. Dalam penyelesaian buku ini tentu saja banyak mendapat bantuan, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Hanya ucapan terima kasih dengan segala ketulusan hati.

Buku ini merupakan gambaran umum yang diramu dari berbagai sumber yang semoga tidak menyalahi tata tulis ilmiah ataupun pelanggaran hak cipta. Kalau pun ada kekhilafan, atas nama penulis dan penyunting (editor) memohon maaf yang sedalam-dalamnya bagi yang bersangkutan. Buku ini disajikan seperti halnya mozaik, tersusun dari tulisan yang berserak, dan kemudian disatukan dalam bagian-bagian yang tak terpisahkan. Sebuah analogi acak tentang konsep dasar IPS.

Ilmu Pengetahuan Sosial sebagai mata pelajaran dalam pendidikan dasar, secara historis muncul bersamaan dengan diberlakukannya Kurikulum tahun 1975 sampai sekarang. IPS memiliki kekhasan dibandingkan dengan mata pelajaran lain, yakni kajian yang bersifat terpadu (*integrated*), interdisipliner, multidimensional, bahkan lintas disiplin ilmu. Karakteristik ini terlihat dari perkembangan IPS sebagai mata pelajaran yang cakupan materinya semakin meluas. Dinamika cakupan semacam itu dapat dipahami mengingat semakin kompleks dan rumitnya permasalahan sosial yang memerlukan kajian secara terintegrasi dinamis agar terhindar dari sifat ketinggalan zaman, di samping keberadaannya yang diharapkan tetap koheren dengan perkembangan sosial yang terjadi. IPS mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. Pada jenjang SD, mata pelajaran IPS memuat materi geografi, sejarah, pemerintahan, politik, sosiologi, dan ekonomi koperasi.

IPS sebagai mata pelajaran di tingkat sekolah dasar pada hakikatnya merupakan suatu integrasi utuh dari disiplin ilmu IPS dan disiplin ilmu lain yang relevan untuk merealisasikan tujuan pendidikan di tingkat persekolahan. Implikasinya, berbagai tradisi dalam IPS termasuk konsep, struktur, cara kerja ilmuwan sosial, aspek metode, maupun aspek nilai yang dikembangkan dalam ilmu-IPS, dikemas secara psikologis, pedagogis, dan sosial budaya untuk kepentingan pendidikan. Berdasarkan perspektif tersebut, secara umum IPS dapat dimaknai sebagai seleksi dari struktur disiplin akademik ilmu-IPS yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk mewujudkan tujuan pendidikan dalam kerangka pencapaian tujuan pendidikan nasional.

Untuk mewujudkan apa yang terurai di atas, diperlukan suatu buku ajar bagi guru SD, mahasiswa/ calon guru SD atau para pemerhati pendidikan yang haus akan bidang keilmuan IPS. Secara ringkas buku ini membahas mengenai konsep dasar IPS di Sekolah Dasar. Bagian awal buku ini secara runtut mengupas konsep dan ruang lingkup kajian IPS. Pembahasan selanjutnya meliputi kurikulum dan pembelajaran. Kemudian, pembahasan secara terstruktur analogis mengenai stuktur pranata dan proses sosial, prinsip dasar hukum dan pemerintahan, manusia dan lingkungan, pengaruh budaya asing terhadap kebudayaan sejarah perjuangan bangsa, perekonomian, dan pembangunan nasional Indonesia.

Semoga dengan kehadiran buku ini turut serta mempunyai andil dalam pembelajaran IPS di SD meskipun tidak akan sebaik dari buku-buku yang telah terbit sebelumnya, setidaknya dapat terjangkau di hadapan para pembaca. Semoga buku sederhana ini bermanfaat bagi pembaca.

Karawang, April 2025
Penulis,

Dr. Sinta Maria Dewi, M.Pd.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I KONSEP ILMU PENGETAHUAN SOSIAL (IPS)	1
A. Pendahuluan	1
B. Pengertian IPS	2
C. Tujuan dan Fungsi Mata Pelajaran IPS	5
D. Karakteristik Mata Pelajaran IPS	8
E. Nilai-nilai dalam Pembelajaran IPS	9
 BAB II KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN	 11
A. Ruang Lingkup Mata Pelajaran IPS	11
B. Pembelajaran IPS Tingkat Sekolah Dasar	12
C. Pengorganisasian Materi IPS	13
D. Kurikulum IPS di SD	15
E. Penilaian dalam Pembelajaran IPS	19
 BAB III RUANG LINGKUP KAJIAN ILMU SOSIAL	 22
A. Konsep Ruang dan Waktu dalam Sejarah	23
B. Konsep Dasar Geografi	31
C. Konsep Dasar Ekonomi	38
D. Konsep Koperasi Indonesia	42
E. Konsep Politik dan Pemerintahan	43
F. Paradigma, Teori, dan Metode Sosiologi	46
G. Perilaku Manusia dalam Perspektif Psikologi Sosial	54
H. Antropologi dan Konsep Kebudayaan	61
 BAB IV KETERAMPILAN DASAR ILMU SOSIAL	 66
 BAB V STUKTUR PRANATA DAN PROSES SOSIAL	 70
A. Pranata Sosial	70
B. Stratifikasi Sosial	72
C. Norma yang Berlaku di Masyarakat	73
D. Sistem Sosial Budaya Indonesia	74
 BAB VI PRINSIP DASAR HUKUM DAN PEMERINTAHAN	 76
A. Konsep Negara Demokrasi	77
B. Konsep Negara Hukum	78
C. Prinsip Negara Hukum dan Negara Demokrasi	79

D. Ciri-ciri Negara Hukum	81
E. Negara Hukum Arti Material	82
F. Negara Hukum "Indonesia" yang Demokratis	82
 BAB VII MANUSIA DAN LINGKUNGAN	 86
A. Pendahuluan	86
B. Manusia sebagai Makhluk Individu dan Sosial	87
C. Hubungan Manusia dengan Lingkungan	88
D. Manusia dan Lingkungan dalam Bingkai Islam	90
E. Pendekatan dalam Kajian Manusia – Lingkungan	92
 BAB VIII PENGARUH BUDAYA ASING TERHADAP KEBUDAYAAN INDONESIA	 94
A. Hakikat Kebudayaan Indonesia	94
B. Orientasi pada Budaya Asing	96
C. Pengaruh Budaya Asing	97
D. Ketahanan Budaya Indonesia, Suatu Keharusan	99
 BAB IX SEJARAH PERJUANGAN BANGSA MASA KOLONIAL	 103
A. Perlawanan Pattimura	103
B. Perlawanan Diponegoro (1825-1830)	104
C. Perlawanan Padri (1821-1838)	107
D. Ekspedisi Militer ke Bali dan Nusa Tenggara	109
E. Perlawanan Rakyat Sulawesi dan Papua	110
F. Perlawanan Rakyat Kalimantan	111
G. Perlawanan Rakyat Palembang dan Jambi	112
H. Perlawanan Rakyat Batak (Si Singamangaraja), 1878- 1907	113
I. Perang Belanda di Aceh (1873-1912)	114
 BAB X SEJARAH PERGERAKAN NASIONAL	 119
A. Politik Etis (1900-1942)	119
B. Budi Utomo	120
C. Sarekat Islam	121
D. Indische Partij	122
E. Muhammadiyah	122
F. Nahdlatul Ulama	123
G. Partai Komunis Indonesia	124
H. Perhimpunan Indonesia	124
I. Partai Nasional Indonesia	125
J. Kongres Pemuda dan Sumpah Pemuda	127

K.	Partindo	128
L.	Persatuan Bangsa Indonesia dan Partai Indonesia Raya	128
M.	Gerakan Rakyat Indonesia	129
N.	Pergerakan Nasional, 1940-1942	129
O.	Runtuhnya Hindia Belanda	130
P.	Partai Politik: Legal dan Ilegal	130
Q.	BPUPKI dan PPKI	132
R.	Sekitar Proklamasi	132
BAB XI SEJARAH PERANG KEMERDEKAAN DAN DIPLOMASI		135
A.	Perang Kemerdekaan 1945-1949	135
B.	Menuju Perundingan	138
C.	Perjanjian Roem Royen	145
D.	Konferensi Meja Bundar (KMB)	154
BAB XII KONSEP DASAR PEREKONOMIAN		156
A.	Hakikat Ekonomi	156
B.	Makroekonomi dan Mikroekonomi	157
C.	Konsep Ilmu Ekonomi	159
BAB XIII STRUKTUR DAN SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA		168
A.	Sistem Perekonomian di Indonesia	168
B.	Periode Sejarah Ekonomi Indonesia	173
C.	Permasalahan Ekonomi Indonesia	180
D.	Koperasi, Solusi Masalah Perekonomian Indonesia	182
BAB XIV PEMBANGUNAN NASIONAL INDONESIA		184
A.	Pendahuluan	184
B.	Hakikat Pembangunan Nasional	184
C.	Perencanaan Pembangunan Nasional	185
D.	Strategi Normatif Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Nasional	186
E.	Pancasila dan Paradigma Pembangunan Nasional	186
F.	Pembangunan Nasional Berkelanjutan	191
DAFTAR PUSTAKA		195
INDEKS		202
BIBLIOGRAFI		204
BIODATA PENULIS		205

BAB I

KONSEP ILMU PENGETAHUAN SOSIAL (IPS)

A. Pendahuluan

Dalam bidang pengetahuan sosial, dikenal istilah Ilmu Sosial dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Istilah IPS dan keberadaannya dalam kurikulum persekolahan di Indonesia tidak terlepas dari perkembangan dan keberadaan Studi Sosial (*Social Studies*) di Amerika Serikat. Istilah Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan terjemahan dari istilah bahasa Inggris *Social Studies* yang telah dikembangkan di Amerika Serikat (Endayani, 2017). Oleh karena itu, gerakan dan paham *Social Studies* di Amerika Serikat banyak mempengaruhi pemikiran mengenai IPS di Indonesia. Studi Sosial (*Social Studies*) bukan merupakan suatu bidang keilmuan atau disiplin bidang akademis, melainkan lebih merupakan suatu bidang pengkajian tentang gejala dan masalah sosial.

Kerangka kerja studi sosial tidak menekankan pada bidang teoretis, namun lebih kepada bidang-bidang praktis dalam mempelajari gejala dan masalah-masalah sosial yang terdapat di lingkungan masyarakat. Studi Sosial tidak terlalu akademis teoritis, namun lebih bersifat pengetahuan praktis yang diajarkan di tingkat persekolahan. Pendekatan yang digunakan dalam studi sosial bersifat interdisipliner (multidisipliner) dengan menggunakan berbagai bidang keilmuan. Sedangkan, pendekatan yang digunakan dalam ilmu sosial (*social science*) lebih bersifat disipliner dari bidang ilmunya masing-masing.

Terdapat perbedaan antara IPS dengan ilmu-ilmu sosial (*Social Science*), antara lain: (1) IPS bukanlah suatu disiplin ilmu seperti halnya ilmu sosial, tetapi IPS lebih tepat sebagai bidang kajian, yaitu suatu kajian terhadap masalah-masalah kemasyarakatan; (2) IPS menggunakan pendekatan multidisipliner, sedangkan Ilmu Sosial menggunakan pendekatan monodisiplin; (3) IPS dirancang untuk kepentingan pendidikan (persekolahan), sedangkan ilmu sosial keberadaannya bisa di dunia persekolahan, perguruan tinggi ataupun di masyarakat (Endayani, 2017).

IPS yang ide dasarnya dari *Social Studies* kemudian mengalami penyesuaian di Indonesia, menyangkut tujuan, materi, dan pengelolaannya. Karena sifatnya yang berupa penyederhanaan dari konsep ilmu-ilmu sosial (*Social Sciences*), di Indonesia IPS dijadikan sebagai mata pelajaran untuk peserta didik di tingkat Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP/MTs). Sedangkan untuk tingkat di atasnya, mulai dari Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMA/MA), dan Perguruan Tinggi, ilmu sosial dipelajari berdasarkan cabang-cabang dari ilmu tersebut.

Istilah IPS di Indonesia mulai dikenal sejak tahun 1970-an sebagai hasil kesepakatan komunitas akademik dan secara formal mulai digunakan dalam sistem pendidikan nasional dalam kurikulum 1975. Dalam dokumen kurikulum tersebut, IPS merupakan salah satu nama mata pelajaran yang diberikan pada jenjang sekolah dasar dan menengah. Mata pelajaran IPS merupakan sebuah nama mata pelajaran integrasi dari mata pelajaran sejarah, geografi, dan ekonomi serta mata pelajaran ilmu sosial lainnya (Hidayat, 2020). Nama IPS ini sejajar dengan nama mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), sebagai integrasi dari mata pelajaran biologi, kimia, dan fisika.

B. Pengertian IPS

Studi sosial dalam arti luas, yaitu persiapan kaum muda agar mereka memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk partisipasi aktif dalam masyarakat).

Social studies in the broadest sense, that is, the preparation of young people so that they possess the knowledge, skills, and values necessary for active participation in society (De Gunal, 2024).

Istilah IPS di Indonesia mulai dikenal sejak 1970-an sebagai hasil kesepakatan komunitas akademik dan secara formal mulai digunakan dalam sistem pendidikan nasional dalam kurikulum 1975. Pengertian IPS sering disalah-tafsirkan dengan ilmu-ilmu sosial. Secara konseptual IPS erat hubungannya dengan studi sosial dan ilmu sosial.

Dalam dokumen kurikulum tersebut IPS merupakan sebuah nama mata pelajaran yang diberikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Mata pelajaran IPS merupakan sebuah mata pelajaran integrasi dari mata pelajaran Sejarah, Geografi, dan Ekonomi serta mata pelajaran ilmu sosial lainnya (Sapriya, 2017). Pendidikan IPS dijadikan nama sebagai pemisah antara Pendidikan IPS dengan Pendidikan IPA. Istilah Pendidikan IPS sering dalam bahasa Inggris *social studies* dan berbeda dengan istilah yang digunakan di negara-negara lain seperti Inggris dan Amerika Serikat. Studi sosial di Australia secara eksplisit environment Istilah ini menunjuk pada sistem lingkungan, baik alam maupun manusia dan bagaimana sistem itu berinteraksi dalam kehidupan masyarakat yang beragam. Disiplin ilmu yang dikembangkan secara umum memiliki persamaan dengan *social studies* pada umumnya, yaitu mengacu pada disiplin ilmu-ilmu sosial. Seperti yang dikemukakan oleh Wesley (1950) dalam bukunya *The Social*

Studies Are The Social Sciences Simplified For Pedagogical Purpose. Hampir sama sebagaimana Barr, dkk. The social studies is an integration of experience and knowledge concerning human relations for the purpose of citizenship education. Tujuannya ialah memberikan kesempatan kepada para siswa untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai yang memungkinkan mereka dapat menjadi warga negara yang berpartisipasi aktif dalam masyarakat yang demokratis. Pengertian

social studies sejak kelahirannya terdapat dalam buku karya Saxe (1991) dengan judul *Social Studies in Schools: A History of the Early Years*. Menurut Saxe, pengertian Pendidikan IPS yang dalam istilah asing dikenal dengan istilah Social Studies, pada tahap awal kelahirannya terdapat dalam The National Herbart Society papers of 1896-1897, yang menegaskan bahwa Social Studies sebagai *delimiting the social sciences for pedagogical use* (upaya membatasi ilmu-ilmu sosial untuk penggunaan secara pedagogik) (Sapriya; Karyadi 2022).

Dokumen tersebut dinyatakan bahwa *Social Studies* sebagai *a specific field to utilization of social sciences data as a force in the improvement of human welfare* (bidang khusus dalam pemanfaatan data ilmu-ilmu sosial sebagai tenaga dalam memperbaiki kesejahteraan umat manusia). Definisi ini memiliki kesamaan dengan dengan definisi *Social Studies* dari Heber Newton, bahwa *Social Studies* sebagai *specially selected from the social sciences for the purpose of improving the lot or the poor and suffering urban worker* (konsep pilihan dari ilmu-ilmu sosial dengan tujuan untuk memperbaiki nasib orang miskin dan kaum buruh perkotaan yang kurang beruntung).

National Council for the Social Studies (NCSS), sebuah organisasi profesional yang secara khusus membina dan mengembangkan *Social Studies* pada tingkat pendidikan dasar dan menengah serta keterkaitannya dengan disiplin ilmu-ilmu sosial dan disiplin ilmu pendidikan hingga lahirnya kesepakatan yang dikeluarkan NCSS dengan *Social Sciences as the Core of the Curriculum* pada perkembangan selanjutnya yaitu tahun 1993 NCSS merumuskan social studies sebagai berikut (Sapriya, 2022).

Social studies is the integrated study of the social sciences and humanities to promote civic competence. Within the school program, social studies provides coordinated, systematic study drawing upon such disciplines as anthropology, archaeology, economics, geography, history, law, philosophy, political science, psychology, religion, and sociology, as well as appropriate content from the humanities, mathematics and natural sciences. The primary purpose of social studies is to help young people develop the ability to make informed and reasoned decisions for the public good as citizens of a culturally diverse, democratic society in an independent world.

Penjelasan di atas memperjelas bahwa tujuan utama pendidikan IPS adalah membantu kaum muda mengembangkan kemampuan untuk membuat keputusan bagi kepentingan publik sebagai warga negara dari beragam budaya dan masyarakat demokratis di dunia. Engle dan Ochoa (1988) dalam Martorella mengemukakan pengertian IPS yaitu *"The social studies are concerned exclusively with the education of citizens"* (Hyland, 2019).

Pembelajaran IPS lebih terkait erat dengan pembelajaran warga, dapat kita simpulkan bahwa IPS lebih banyak mempelajari tentang manusia baik yang ada dalam lingkungan sekitar maupun tempat yang lain. Menurut Martorella pengertian *social studies* yaitu:

selected information and modes of investigation from the social sciences, selected information from any area that relates directly to an understanding of individuals, groups, societies, and applications of the selected information to citizenship education (Martorella, 1994: 7).

Sama halnya pengertian IPS di Indonesia tidak jauh berbeda sebagaimana yang terjadi di sejumlah negara pada umumnya masih dipersepsikan secara beragam dan mempunyai perbedaan makna di setiap jenjang pendidikan.

Pengertian IPS di setiap sekolah itu mempunyai perbedaan makna, disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik khususnya antara IPS untuk sekolah dasar (SD) dengan IPS untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan IPS untuk Sekolah Menengah Atas (SMA). Pengertian IPS di persekolahan tersebut ada yang berarti nama mata pelajaran yang berdiri sendiri, ada yang berarti gabungan (*integrated*) dari sejumlah mata pelajaran atau disiplin ilmu, dan ada yang berarti program pengajaran. Perbedaan ini dapat pula diidentifikasi dari perbedaan pendekatan yang diterapkan pada masing-masing jenjang persekolahan tersebut (Sapriya, 2009: 20).

Menurut Sumaatmadja (2008: 9) IPS tidak lain adalah mata pelajaran atau mata kuliah yang mempelajari kehidupan sosial yang kajiannya mengintegrasikan bidang-bidang ilmu sosial dan humaniora. Dengan kata lain, kajian-kajian IPS sangat luas melalui berbagai macam pendekatan-pendekatan interdisipliner yang saling berkaitan dengan kehidupan sosial manusia (*humaniora*) (Sumaatmadja, 2008: 9).

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) adalah program pendidikan yang memilih bahan pendidikan dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan *humanity* (ilmu pendidikan dan sejarah) yang diorganisir dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan kebudayaan Indonesia (Soemantri, 2001: 92).

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan integrasi dari berbagai cabang ilmu-ilmu sosial dan humaniora, seperti: sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum, dan budaya. Ilmu Pengetahuan Sosial dirumuskan atas dasar realitas dan fenomena sosial yang mewujudkan satu pendekatan interdisipliner dari aspek dan cabang ilmu-ilmu sosial. IPS atau studi sosial merupakan bagian dari kurikulum sekolah yang diturunkan dari isi materi cabang-cabang ilmu sosial: sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, antropologi, filsafat, dan psikologi sosial (Depdiknas, 2006: 4).

Masih banyak definisi tentang IPS (Social Studies) yang telah disampaikan para ahli. Namun, pada umumnya definisi-definisi tersebut menunjukkan pengertian bahwa IPS sebagai program pendidikan atau bidang studi dalam kurikulum sekolah yang mempelajari kehidupan manusia dalam masyarakat serta hubungan atau interaksi antara manusia dengan lingkungannya (fisik dan sosial). Isi atau materi IPS diambil dan dipilih dari bagian-bagian pengetahuan/konsep dari ilmu- ilmu sosial disesuaikan tingkat pertumbuhan dan usia siswa.

Berpijak dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa IPS merupakan: 1) mata pelajaran yang diajarkan pada peserta didik di tingkat sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP/MTs), 2) mengkaji mengenai kehidupan manusia dalam masyarakat, 3) bahannya bersumber dari disiplin ilmu sosial.

C. Tujuan dan Fungsi Mata Pelajaran IPS

IPS sebagai program pendidikan tidak hanya menyajikan konsep konsep pengetahuan semata, namun yang terpenting harus mampu membina peserta didik menjadi warga negara dan warga masyarakat yang tahu akan hak dan kewajibannya, memiliki tanggung jawab atas kesejahteraan bersama seluas- luasnya.

Pendidikan IPS di berbagai negara mengalami perubahan- perubahan dalam konteks tujuan tiap-tiap negara dalam pembelajaran IPS. Banyak tokoh-tokoh yang berpendapat mengenai tujuan pendidikan IPS, yang pada dasarnya mempunyai persamaan diantara berbagai pendapat tersebut.

Pendapat yang hampir sama oleh Stanley dan Nelson (dalam Ross, 2006: 21) mengemukakan sebagai berikut.

They argue that the key element in the dispute over the purpose of social studies in the school curriculum involves the relative emphasis given to cultural transmission or to critical or reflective thinking. When cultural transmission is emphasized, the intent to use the social studies curriculum to promote social adaption. The emphasis is on teaching content, behaviors, and values that reflect views accepted by the traditional, dominant society.

Tujuan pendidikan IPS di Indonesia pada dasarnya mempersiapkan para peserta didik sebagai warga negara yang menguasai pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), sikap dan nilai (attitudes and values) yang dapat dipergunakan sebagai kemampuan untuk memecahkan masalah, mengambil keputusan, dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan agar menjadi warga negara yang baik (Sapriya, 2009: 12). Menurut Soemantri (2001: 260), tujuan pengajaran IPS di sekolah sebagai berikut.

1. Pengajaran IPS ialah untuk mendidik para siswa menjadi ahli ekonomi, politik, hukum, sosiologi dan pengetahuan sosial lainnya sehingga harus terpisah- pisah sesuai dengan *body of knowledge* masing-masing disiplin ilmu sosial tersebut.

2. Pengajaran IPS ialah untuk menumbuhkan warga negara yang baik. Sifat warga negara yang baik akan lebih mudah ditumbuhkan pada siswa apabila guru mendidik mereka dengan jalan menempatkannya dalam konteks kebudayaannya daripada memusatkan perhatian pada disiplin ilmu sosial yang terpisah-pisah.
3. Pendapat ketiga adalah bentuk kompromi dari pendapat pertama dan kedua yang menekankan pada organisasi bahan pelajaran harus dapat menampung tujuan para siswa yang meneruskan pendidikan maupun yang terjun langsung ke masyarakat.
4. Pengajaran IPS dimaksudkan untuk mempelajari bahan pelajaran closed areas) agar mampu menyelesaikan masalah interpersonal maupun antarpersonal.

IPS atau *social studies* lebih mengarah untuk persiapan peserta didik untuk siap berpartisipasi dalam masyarakat, sehingga setiap peserta didik mengetahui bagaimana peran diri sendiri baik dalam keluarga maupun masyarakat, mengetahui peranan orang lain dan bagaimana memerankan peranan orang lain, serta siap untuk menerima bentuk apapun yang diberikan masyarakat. Jadi, Pendidikan IPS merupakan kajian ilmu yang terintegrasi dalam disiplin ilmu-ilmu sosial yang bersifat menyeluruh (holistik) yang materinya diambil dari rumpun ilmu sosial, seperti bidang ilmu sejarah, geografi, sosiologi, antropologi, politik, ekonomi, psikologi dan filsafat yang dikonsepsi menjadi pembelajaran terpadu.

Tujuan mata pelajaran IPS adalah untuk mempersiapkan anak didik menjadi warga negara yang baik berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dengan menitikberatkan pada pengembangan individu yang dapat memahami masalah-masalah yang ada dalam lingkungan, baik yang berasal dari lingkungan sosial yang membahas interaksi antar manusia, dan lingkungan alam yang membahas antara manusia dengan lingkungannya, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Selain itu, dapat berpikir kritis dan kreatif, dan dapat melanjutkan serta mengembangkan nilai-nilai budaya bangsa.

Mata pelajaran IPS bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi, dan terampil mengatasi masalah yang terjadi sehari-hari, baik yang menimpa dirinya sendiri maupun yang menimpa masyarakat (Sumaatmadja, 1984: 20).

National Council for the Social Studies (NCSS) menyebutkan bahwa tujuan *Social Studies* (IPS) adalah membentuk siswa mengembangkan kemampuan untuk membuat keputusan yang rasional sebagai warga negara dengan kultur yang beragam, dan masyarakat demokratis di dunia yang saling ketergantungan (Ellis, 1998: 8). Menurut Zamroni (2001: 11), arah pengajaran ilmu-ilmu sosial adalah mengembangkan kemampuan berpikir kritis (*critical thinking*) dan kesadaran serta komitmen siswa terhadap perkembangan masyarakat.

Sarifudin (1989: 15) menyatakan bahwa IPS bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap sosial (social skill). Senada dengan Sarifudin, Cholisin (2006: 131- 132) menyatakan bahwa tujuan substansif yang mendasar dari pengajaran Studi Sosial di sekolah ialah meningkatkan perilaku, sikap, keterampilan, dan pengetahuan (atau disingkat BASK= behavior, attitude, skill, dan knowledge) para peserta didik.

Lebih lanjut, Sapriya (2009: 201) menjelaskan tujuan mata pelajaran IPS di SMP/MTs adalah sebagai berikut: (1) mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya, (2) memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, inkuiri, memecahkan masalah, dan ketrampilan dalam kehidupan sosial, (3) memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan, dan (4) memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, dan berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk di tingkat lokal, nasional, dan global.

Jika dikaji kembali dengan melihat GBPP 1994 mata pelajaran pendidikan IPS, pendidikan IPS di Sekolah Dasar memiliki sumbangan yang sangat besar dalam upaya pencapaian tujuan pendidikan dasar, di antaranya yaitu:

1. Memberikan perbekalan pengetahuan tentang manusia dan seluk beluk kehidupannya dalam asta-gatra kehidupan.
2. Membina kesadaran, keyakinan dan sikap pentingnya hidup bermasyarakat dengan penuh rasa kebersamaan, bertanggungjawab, dan manusiawi (menghargai derajat-martabat sesama, penuh kecintaan dan rasa kekeluargaan).
3. Membina keterampilan hidup bermasyarakat dalam negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila.
4. Menunjang terpenuhinya bekal kemampuan dasar peserta didik dalam mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara, dan anggota umat manusia.
5. Membina perbekalan dan kesiapan untuk belajar lebih lanjut atau melanjutkan ke jenjang lebih tinggi.

Tujuan tersebut membawa implikasi pada pola pembelajaran mata pelajaran IPS di sekolah dasar yang dikarakteristikan pada upaya penekanan dan pengenalan dirinya sebagai makhluk sosial yang tahu tentang dirinya, lingkungan sekitarnya (sosial, budaya, fisik, alam). Karena, lingkungan sekitar anak menjadikan yang bersangkutan aktif mengembangkan diri.

IPS merupakan satu bidang kajian yang diberikan dalam pendidikan formal sejak bangku sekolah dasar dalam rangka mendukung ketercapaian tujuan pendidikan nasional Indonesia. Tujuan diberikannya pengajaran IPS pada jenjang sekolah dasar adalah agar siswa mampu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dasar yang berguna bagi dirinya dalam kehidupan sehari-hari.

Melalui pengajaran IPS diharapkan berkembangnya kemampuan dan sikap rasional tentang gejala-gejala sosial serta kemampuan tentang perkembangan masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia di masa lampau dan masa kini (Depdikbud, 1993: 9).

Permendiknas No.22 tahun 2006 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah menyebutkan mata pelajaran IPS di SMP secara rinci memiliki empat tujuan, yaitu :

1. Mengetahui konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya;
2. Memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, inkuiri, memecahkan masalah dan keterampilan dalam kehidupan sosial;
3. Memiliki komitmen dan kesadaran nilai-nilai sosial dan kemanusiaan, dan
4. Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dan berkompetensi dalam masyarakat yang majemuk di tingkat lokal, nasional dan global.

Keempat tujuan tersebut pada dasarnya untuk membentuk dan mengembangkan tiga kecakapan peserta didik, yaitu kecakapan akademik, kecakapan personal dan kecakapan sosial. Kecakapan akademik dijabarkan lebih rinci dalam tujuan pertama, yaitu mengetahui konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya. Kecakapan personal diuraikan lebih lanjut dalam tujuan kedua dan ketiga, yakni memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, inkuiri dan memecahkan masalah; sedangkan sosial diuraikan dalam tujuan yang keempat, yakni siswa diharapkan memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerja sama dan berkompetensi baik di tingkat lokal, nasional dan global.

Adapun fungsi mata pelajaran IPS adalah untuk memberikan kepada peserta didik informasi tentang segala sesuatu yang menyangkut peri-kehidupan manusia dalam lingkungannya. Menurut Kurikulum Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun 2006, fungsi mata pelajaran IPS adalah mengembangkan pengetahuan, nilai, sikap, dan keterampilan sosial peserta didik agar dapat direfleksikan dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia.

D. Karakteristik Mata Pelajaran IPS

Setiap mata pelajaran mempunyai karakteristik yang berbeda dengan mata pelajaran yang lain. Demikian juga mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Soemantri (2001: 38) menjelaskan bahwa pembaharuan pengajaran IPS sebenarnya masih dalam proses yang penuh berisi berbagai eksperimen. Adapun ciri- ciri yang kedapatan di dalamnya memuat rincian sebagai berikut.

1. Bahan pelajarannya akan lebih banyak memperhatikan minat para siswa, masalah-masalah sosial, keterampilan berpikir serta pemeliharaan/pemanfaat lingkungan alam.

2. Mencerminkan berbagai kegiatan dasar dari manusia.
3. Organisasi kurikulum IPS akan bervariasi dari susunan yang *integrated* (terpadu), *correlated* (berhubungan), sampai yang *separated* (terpisah)
4. Susunan bahan pembelajaran akan bervariasi dari pendekatan kewargaan negara, fungsional, humanistik, sampai yang struktural.
5. Kelas pengajaran IPS akan dijadikan laboratorium demokrasi
6. Evaluasinya tak hanya akan mencakup aspek-aspek kognitif, afektif, dan psikomotor saja, tetapi juga mencoba mengembangkan apa yang disebut *democratic quotient* dan *citizenship quotient*,
7. Unsur-unsur sosiologi dan pengetahuan sosial lainnya akan melengkapi program pembelajaran IPS, demikian pula unsur-unsur science, teknologi, matematika, dan agama akan ikut memperkaya bahan pembelajaran.

Karakteristik lain yang juga merupakan ciri mata pelajaran IPS adalah digunakannya pendekatan pengembangan bahan pembelajaran IPS dalam rangka menjawab permasalahan yang sering muncul dalam proses pembelajaran, baik di tingkat sekolah dasar maupun lanjutan.

E. Nilai-nilai dalam Pembelajaran IPS

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, pengembangan sumber daya manusia (SDM) berkualitas di era kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dewasa ini yang sangat urgen. Pengembangan SDM harus bersamaan dengan pengembangan nilai-nilai yang terkandung dalam pembelajaran IPS, sebab IPS sarat dengan nilai-nilai, seperti nilai teoretis, nilai praktis, nilai edukatif dan nilai ketuhanan (Sumaatmadja, 1977: 45-49;

1. Nilai Teoritis

Membina peserta didik hari ini pada proses perjalanan diarahkan menjadi SDM untuk hari esok. Oleh karena itu, pembelajaran IPS tidak hanya menyajikan dan membahas kenyataan, fakta dan data yang terlepas-lepas, melainkan lebih jauh dari itu yakni menelaah keterkaitan aspek kehidupan sosial dengan yang lain. Peserta didik dibina dan dikembangkan daya nalarinya ke arah dorongan mengetahui sendiri kenyataan (sense of reality) dan dorongan menggali sendiri di lapangan (sense of discovery). Kemampuan menyelidiki dan meneliti dengan mengajukan berbagai pertanyaan (sense of inquiry) mereka bina serta kembangkan.

2. Nilai Praktis

Pokok bahasan IPS jangan hanya tentang pengetahuan yang konseptual teoritis belaka, melainkan digali dari kehidupan sehari-hari; misalnya mulai dari lingkungan keluarga, di pasar, di jalan, dan tempat-tempat lain. Dalam hal ini, nilai praktis disesuaikan dengan tingkat usia dan kegiatan peserta didik sehari-hari. Pengetahuan praktis tersebut bermanfaat dalam mengikuti berita, mendengarkan radio, membaca cerita, menghadapi permasalahan kehidupan sehari-hari sampai dengan pengetahuan IPS yang berguna untuk melaksanakan pekerjaan sebagai sebagai

karyawan, PNS, pejabat daerah, wartawan dan sebagainya. Pembelajaran IPS tersebut diproses secara menarik dan tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari, dan secara tidak langsung memiliki nilai praktis serta strategis dalam membina SDM sesuai dengan kenyataan hidup hari ini dan masa-masa mendatang.

3. Nilai Edukatif.

Salah satu tolak ukur keberhasilan pelaksanaan pembelajaran IPS, yaitu adanya perubahan perilaku sosial peserta didik ke arah yang lebih baik. Perilaku tersebut, meliputi aspek-aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Peningkatan kognitif dalam hal ini tidak hanya terbatas makin meningkatnya pengetahuan sosial, melainkan pula peningkatan nalar sosial dan kemampuan mencari alternatif-alternatif pemecahan masalah sosial. Oleh karena itu, materi yang dibahas dalam pembelajaran IPS, tidak hanya terbatas pada kenyataan, fakta dan data sosial, melainkan juga mengangkat masalah sosial yang terjadi sehari-hari.

Dalam proses peningkatan perilaku sosial melalui pembinaan nilai edukatif, tidak hanya terbatas pada perilaku kognitif, melainkan lebih mendalam lagi berkenaan dengan perilaku afektifnya. Justru perilaku inilah yang lebih mewarnai aspek kemanusiaan. Melalui pembelajaran IPS, perasaan, penghayatan, sikap, kepedulian, dan tanggung jawab sosial peserta didik ditingkatkan. Kepedulian dan tanggung sosial, secara nyata dikembangkan dalam pembelajaran IPS untuk mengubah perilaku peserta didik bekerja sama, gotong-royong, dan membantu pihak-pihak yang membutuhkan.

4. Nilai Ketuhanan

Kita dapat menghayati dalam menikmati segala yang kita peroleh sebagai manusia, makhluk individu dan makhluk sosial yang berbeda dengan makhluk-makhluk hidup ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, baik tumbuh-tumbuhan maupun hewan. Kenikmatan dari Tuhan Yang Maha Esa berupa akal pikiran yang berkembang dan dapat dikembangkan yang telah membawa manusia sendiri untuk mampu memenuhi kebutuhannya dari sumber daya alam yang telah disediakan oleh-Nya. Kenikmatan kita sebagai manusia yang mampu menguasai IPTEK, menjadi landasan kita untuk mendekatkan diri dan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Kekaguman kita sebagai manusia kepada segala ciptaan-Nya baik berupa fenomena fisikal, alamiah maupun fenomena kehidupan, merupakan nilai ketuhanan yang strategis sebagai bangsa yang berfalsafah Pancasila. Pendidikan IPS dengan ruang lingkup cakupan yang sangat luas, menjadi landasan kuat bagi penanaman dan pengembangan nilai ketuhanan yang menjadi kunci kebahagiaan kita, baik lahir maupun batin. Nilai ketuhanan ini menjadi landasan moralitas SDM masa kini dan masa yang akan datang.

BAB II

KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN

A. Ruang Lingkup Mata Pelajaran IPS

Secara mendasar, pembelajaran IPS berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan manusia. IPS juga berkaitan dengan bagaimana usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan materi, budaya, jiwa, pemanfaatan sumber daya yang ada di permukaan bumi, mengatur kesejahteraan dan pemerintahannya, untuk mempertahankan kehidupan masyarakat manusia.

Pada prinsipnya, hakikat yang dipelajari IPS adalah bagaimana mempelajari, menelaah, mengkaji sistem kehidupan manusia di muka bumi. Kebutuhan manusia dalam konteks sosial sangat banyak dan luas, maka pembelajaran IPS dalam setiap jenjang pendidikan perlu diadakan pembatasan sesuai dengan kemampuan peserta didik pada jenjang masing-masing (Wahab, 2009: 3.6 – 3.7). Misalnya, ruang lingkup materi IPS untuk tingkat sekolah dasar dibatasi pada gejala dan masalah sosial yang mampu dijangkau pada geografi dan sejarah. Itu pun diutamakan pada gejala dan masalah sosial sehari-hari yang ada di lingkungan siswa.

Radius ruang lingkup tersebut dikembangkan secara bertahap, sejalan dengan perkembangan tingkat kematangan berpikir siswa. Pada tingkat lanjutan, ruang lingkup dan bobotnya diperluas pada masalah-masalah lingkungan, penerapan teknologi dalam berbagai sektor kehidupan, transportasi,

komunikasi, pengangguran, kelaparan, kemiskinan, dan sumber daya. Dalam proses pembelajarannya, berbagai metode dan pendekatan digunakan. Kesadaran para peserta didik terhadap gejala dan masalah-masalah sosial harus terus dipertajam, dan dikembangkan. Kemampuan menalar (reasoning) para siswa terus diasah. Dalam batas-batas yang masih mendasar, seharusnya mulai diterapkan teori, konsep, dan prinsip-prinsip keilmuan pada penalaran tersebut.

Selanjutnya, secara garis besar Muchtar (2007: 2.24) mengemukakan bahwa ruang lingkup mata pelajaran IPS mencakup empat aspek, yaitu:

1. Sistem sosial dan budaya, meliputi: individu, keluarga, dan masyarakat, sosiologi sebagai ilmu dan metode, interaksi sosial, sosialisasi, pranata sosial, struktur sosial, kebudayaan, dan perubahan sosial budaya.
2. Manusia, tempat, dan lingkungan, meliputi: sistem informasi geografi, interaksi gejala fisik dan sosial, struktur internal suatu tempat/wilayah, dan interaksi keuangan, serta persepsi lingkungan dan kewilayahan.
3. Perilaku ekonomi dan kesejahteraan, meliputi: ketergantungan, spesialisasi, pembagian kerja, perkoperasian, dan kewirausahaan serta pengelolaan keuangan perusahaan.
4. Waktu, berkelanjutan, dan perubahan meliputi: dasar-dasar ilmu sejarah, fakta, peristiwa, dan proses.

B. Pembelajaran IPS Tingkat Sekolah Dasar

Pembelajaran IPS mempunyai tingkatan masing-masing sesuai dengan kemampuan peserta didik menangkap tentang arti sosial. Banyak sekolah-sekolah yang memasukkan IPS ke dalam kurikulum sekolah. Istilah IPS di Sekolah Dasar merupakan nama mata pelajaran yang berdiri sendiri sebagai integrasi dari sejumlah konsep disiplin ilmu sosial, humaniora, sains, bahkan berbagai isu dan masalah sosial kehidupan (Sapriya, 2009: 20). Namun, di Sekolah Dasar tidak secara mentah mengajarkan secara khusus dalam geografi, sejarah, ekonomi, politik, atau ilmu-ilmu sosial yang lain. Peserta didik di Sekolah Dasar pada umumnya masih menggunakan dasar pemikiran dari apa yang dilihat (Jarolimek, 1986: 8).

When children are studying the local landscape, they are dealing in a simple way with geography. When they learn about the need for rules and laws, they are beginning to understand ideas from political science; and when they study about life in early times, they are having their first brush with history. It is not the purpose of the elementary school to teach the social science disciplines apart from their relevance to social reality. They should be taught in ways that will help children build an understanding of the social and physical world in which they live.

Ada perbedaan materi mendasar dalam pembelajaran IPS di Sekolah Dasar. Pembelajaran IPS di setiap sekolah tidak selalu sama ruang lingkupnya.

Setiap daerah ataupun negara mempunyai latar sosial yang berbeda. Jadi, pembelajaran IPS disesuaikan dengan ciri sosial yang khas di daerah masing-masing. NCSS memberikan ruang lingkup dan tingkatan dalam pembelajaran IPS. Semuanya dimulai dari tingkat Taman Kanak-kanak sampai tingkat ke-12.

Social studies is basic subject of the K-12 curriculum that (1) derives its goals from the nature of citizenship in a democratic society that is closely linked to other nations and people of the world; (2) draws its content primarily from history, the social sciences, and, in some respects, from the humanities and science; and (3) is taught in ways that reflect an awareness of the personal, social, and cultural experiences and developmental levels of learners. (Task Force on Scope and Sequence dalam Martorella, 1994: 6).

Beberapa lingkup pembelajaran IPS yang disarankan oleh NCSS dari Taman Kanak-kanak sampai Sekolah dasar yaitu sebagai berikut.

Kindergarten programs ordinarily deal with topics that help to familiarize children with their immediate surrounding. Grade-one studies are based in the local area, such as neighborhood, but vision is often made to associate the local area with the larger world. Grade-two program provides for frequent systematic contact with the world beyond the neighborhood, the children begin to learn how their part of the world is connected with other place on earth. Grade-three program often emphasizes the larger community concept: what a community is, type of communities, why some communities grow though others do not, how communities provide for basic needs. In Grade-four the world as the home of people, showing

various geographical features of the earth along with variety in ways of living, is often stressed. These studies help children understand some of the adaptive and innovative qualities of human being. Grade-five, almost everywhere the fifth-grade program includes the geography, history, early development, and growth. Grade-six program may include the study between culture-nations. A major limitation of sixth-grade programs is that they attempt to deal with too many topics (Jarolimek, 1986: 12-13).

Pembelajaran IPS tingkat sekolah dasar menjadi penting ketika kita melihat situasi dan maraknya informasi tanpa batas yang perkembangan dalam bidang sosial tidak bisa kita bendung memberikan tantangan tersendiri dalam menghadapi kondisi tersebut. Menurut Sumaatmadja (2008: 26), pembelajaran IPS tingkat sekolah dasar harusnya melihat pada perkembangan mental-psikologis anak yang dapat berkembang dan dikembangkan. Dasar mental-psikologis anak ini berkesinambungan dengan kehidupan sosial anak yang menjadi pengetahuan sosial.

Istilah IPS di sekolah dasar menurut Gunawan (2013: 48) merupakan suatu bahan kajian yang terpadu yang merupakan penyederhanaan, adaptasi, seleksi, dan modifikasi yang diorganisasikan dari konsep-konsep dan keterampilan Sejarah, Geografi, Sosiologi, Antropologi, dan Ekonomi. Jadi, pembelajaran IPS Sekolah Dasar merupakan kajian ilmu yang terintegrasi dalam disiplin ilmu-ilmu sosial yang bersifat menyeluruh (holistik) yang materinya diambil dari rumpun ilmu sosial yang disesuaikan dengan lingkup keadaan sosial masyarakat.

C. Pengorganisasian Materi IPS

Pengorganisasian materi membahas mengenai materi yang ada, diatur sehingga ini merupakan suatu kesatuan yang utuh. Pengorganisasian materi amat penting dalam pendidikan ilmu-ilmu sosial, demikian pentingnya sehingga dalam pandangan tertentu pengorganisasian materi ini bahkan dikenal sebagai jenis kurikulum. Jenis pengorganisasian materi IPS dapat dibagi menjadi tiga yakni : (1) terpisah (separated); (2) korelasi (correlated), dan (3) fusi (integrated) (Hamid Hasan, 1996: 147).

1. Pengorganisasian Terpisah

Pengorganisasian terpisah adalah bentuk pengorganisasian materi kurikulum yang tertua. Dalam pengorganisasian kurikulum yang demikian, setiap disiplin ilmu-ilmu sosial diajarkan secara terpisah berdasarkan ciri dan karakteristiknya masing-masing. Dalam organisasi ini sejarah diajarkan terlepas dari geografi, ekonomi, dan sosiologi. Materi yang harus dipelajari siswa sepenuhnya dikembangkan dari masing-masing disiplin ilmu yang bersangkutan.

2. Pengorganisasian Korelatif

Pengorganisasian materi ini tidak menghilangkan ciri dari disiplin ilmu yang bersangkutan. Pendidikan sejarah sebagai suatu keutuhan tetap saja dipertahankan, seperti halnya dengan pendidikan geografi, ekonomi dan sosiologi. Pengorganisasian ini hanya mencoba mencari keterkaitan pembahasan antara satu pokok bahasan dengan pokok bahasan lainnya.

Melalui keterkaitan itu siswa belajar mengenai satu pokok dari suatu disiplin ilmu berhubungan dengan pokok bahasan lain dari disiplin ilmu lainnya. Sebagai contoh, sejarah membicarakan Peristiwa Rengasdengklok, maka geografi membahas mengenai Provinsi Jawa Barat, sedangkan sosiologi membahas mengenai nilai yang berlaku dalam hubungan antara orang yang dianggap tua dengan yang dianggap muda.

Contoh lain masalah kependudukan, kajian geografi menjadi yang utama, sedangkan materi disiplin ilmu sosial yang lain sebagai materi perluasan atau pendalaman. Sejarah melihat sejarah perkembangan penduduk dari masa sebelumnya, sosiologi membicarakan mengapa pertumbuhan penduduk berdasarkan status sosial, ekonomi membahas konsekuensi penambahan penduduk yang dihubungkan dengan penyediaan lapangan kerja, produksi, konsumsi, dan pendapatan nasional.

3. Pengorganisasian Fusi

Sesuai dengan namanya dalam organisasi fusi, ciri dan warna disiplin ilmu sudah tidak tampak. Dalam organisasi ini orang tidak dapat mengatakan bahwa ini adalah bahasan sejarah, geografi, sosiologi atau ekonomi. Peleburan tersebut dilakukan atas dasar pertimbangan pendidikan dan bukan atas dasar pertimbangan kepentingan keilmuan. Pertimbangan pendidikan mengutamakan kepentingan siswa di atas kepentingan disiplin ilmu (Hamid Hasan, 1996: 156)

Pengembangan materi yang berdasarkan pendekatan fusi memang banyak menghilangkan karakteristik disiplin ilmu. Siswa diajak berpikir dalam alur pikir logis yang sifatnya umum dan tidak terbatas pada logika keilmuan disiplin tertentu. Pengorganisasian seperti ini, dilakukan di SD kelas rendah (Kelas 1, 2 dan 3) dengan model Pembelajaran Tematik. Misalnya, Tema : Diri Sendiri, dapat ditinjau dari IPS, PKn, SBK, Bahasa Indonesia, dan IPA.

Model Pembelajaran Terpadu merupakan salah satu model implementasi kurikulum yang dianjurkan untuk disampaikan pada semua jenjang pendidikan mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD/MI) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA/MA). Model Pembelajaran Terpadu pada hakikatnya merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang memungkinkan siswa baik secara individu maupun kelompok aktif mencari, menggali, dan menemukan konsep serta prinsip secara holistik dan otentik (Depdiknas, 2007: 1). Pembelajaran ini merupakan model yang mencoba untuk memadukan beberapa pokok bahasan (Beane, 1995: 615).

Menurut Ujang Sukardi, dkk (2001: 3) Pembelajaran Terpadu pada hakikatnya merupakan kegiatan mengajar dengan memadukan beberapa mata pelajaran dalam satu tema. Dengan demikian, pelaksanaan pembelajaran dengan model terpadu dapat dilakukan dengan mengajarkan beberapa materi pelajaran disajikan setiap pertemuan. Dengan berperan secara aktif di dalam eksplorasi atau peristiwa, siswa akan dapat mempelajari materi ajar dan proses pembelajaran beberapa bidang studi dalam waktu yang bersamaan. Dalam eksplorasi yang bertumpu pada tema tertentu, pembelajaran membicarakan sekitar tema tertentu baru kemudian membahas masalah konsep-konsep pokok yang terkait dalam tema.

Menurut Depdiknas, (2006: 7-8) pembelajaran IPS Terpadu di SMP/MTs dapat dilaksanakan dengan tiga model, yakni (1) model integrasi berdasarkan topik, (2) model integrasi berdasarkan potensi utama dan (3) model integrasi berdasarkan permasalahan. Model integrasi berdasarkan topik yang terkait, misalnya "Kegiatan Ekonomi Penduduk". Kegiatan ekonomi penduduk ditinjau dari persebaran dan kondisi geografis yang tercakup dalam disiplin geografi.

Secara sosiologis, kegiatan ekonomi penduduk dapat mempengaruhi interaksi sosial di masyarakat dan sebaliknya. Secara historis, dari waktu ke waktu kegiatan ekonomi penduduk selalu mengalami perubahan. Selanjutnya, penguasaan konsep-konsep tentang jenis-jenis kegiatan ekonomi sampai pada taraf mampu menumbuhkan kreativitas dan kemandirian dalam melakukan tindakan merupakan kajian bidang ekonomi.

Model integrasi berdasarkan potensi utama wilayah setempat, misalnya "Potensi Surakarta sebagai Daerah Tujuan Wisata". Dalam pembelajaran yang dikembangkan dalam kebudayaan Surakarta dikaji dan ditinjau dari faktor alam, historis kronologis dan kausalitas, serta perilaku masyarakat terhadap aturan dan kegiatan ekonomi penduduk. Model integrasi berdasarkan permasalahan misalnya "Daerah Kumuh". Pada pembelajaran terpadu "Daerah Kumuh" dapat ditinjau dari berbagai faktor yang mempengaruhinya. Di antaranya adalah faktor historis, geografis, ekonomis, dan sosiologis.

D. Kurikulum IPS di SD

Indonesia mengalami beberapa kali pergantian kurikulum. Setiap kurikulum memiliki karakteristik tersendiri termasuk dalam hal disiplin- disiplin ilmu sosial yang dikembangkan dalam pendidikan IPS. Dalam hal ini pembicaraan tentang kurikulum akan diawali dari kurikulum tahun 1964 sampai pada kurikulum tahun 2025. Selain itu pembahasan tentang kurikulum tersebut hanya mengkaji disiplin-disiplin ilmu sosial yang dikembangkan dalam kurikulum tersebut.

Disiplin ilmu sosial yang dikembangkan dalam kurikulum tahun 1964 meliputi mata pelajaran Sejarah Indonesia, Geografi Indonesia, Ekonomi dan pendidikan kewarganegaraan dalam mata pelajaran civics. Mata pelajaran Sejarah Indonesia dan Geografi Indonesia dianggap sebagai mata pelajaran yang memiliki peran penting dalam membina kualitas siswa yang diharapkan suasana kehidupan politik pada saat itu memerlukan adanya upaya pendidikan yang diarahkan untuk membentuk identitas bangsa yang kuat. Pelajaran Sejarah akan mampu memberikan landasan yang kuat karena ia akan mampu menggambarkan perkembangan dan dinamika kehidupan masyarakat dan akekuasaan yang ada di wilayah Nusantara. Sementara melalui Geografi Indonesia, siswa diperkenalkan pada wilayah Republik Indonesia dengan berbagai keragaman corak lingkungan fisik dan budayanya.

Seiring dengan terjadinya perubahan politik pada saat itu yaitu dengan terjadinya pergantian pemerintahan dari pemerintah Orde Lama kepada pemerintah Orde Baru maka berpengaruh pula pada perubahan kurikulum. Kurikulum 1964 digantikan oleh kurikulum 1968. Dalam kurikulum 1968, disiplin ilmu sosial yang dikembangkan dalam pendidikan IPS masih meliputi pendidikan Sejarah, geografi dan ekonomi. Perubahan yang paling utama terlihat dari perubahan mata pelajaran civics menjadi kewarganegaraan. Mata pelajaran ini kemudian berubah menjadi Pendidikan Moral Pancasila dan terakhir disebut dengan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Pada kurikulum selanjutnya yaitu kurikulum tahun 1975, disiplin ilmu sosial yang dikembangkan dalam pendidikan IPS lebih beragam. Disiplin ilmu sosial yang dikembangkan dalam kurikulum 1975 meliputi geografi dan kependudukan, sejarah ekonomi-koperasi, antropologi budaya serta tata buku dan hitung dagang. (Gunawan, 2016). Perubahan yang signifikan terlihat dalam disiplin ilmu sosial yang dikembangkan dalam kurikulum selanjutnya yaitu kurikulum tahun 1984. Disiplin ilmu sosial yang dikembangkan dalam kurikulum 1984 memasukkan disiplin ilmu sosiologi, antropologi, hukum, politik disamping disiplin ilmu sejarah, geografi, ekonomi. Selain itu dalam kurikulum tahun 1984 dimasukkan kajian-kajian kemasyarakatan yang diintegrasikan dalam pendidikan IPS. Kajian tersebut adalah tentang lingkungan hidup dan keluarga berencana yang dirumuskan dalam tujuan kurikulum mata pelajaran geografi, ekonomi, sosiologi, antropologi dan tata negara.

Kurikulum selanjutnya yaitu kurikulum tahun 1994 tidak terjadi perubahan yang berarti dalam hal disiplin ilmu sosial yang dikembangkan dalam pendidikan IPS. Disiplin ilmu sosial yang dikembangkan dalam pendidikan IPS berdasarkan kurikulum 1994 masih meliputi sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, antropologi, politik dan hukum. Perubahan hanya terlihat dari pergantian label mata pelajaran geografi menjadi ilmu bumi serta adanya pemisahan mata pelajaran sosiologi dan antropologi pada tingkat SMA yang sebelumnya diberikan dalam satu mata pelajaran sosiologi-antropologi.

Demikian juga pada kurikulum tahun 2004, disiplin ilmu sosial yang dikembangkan masih meliputi sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, antropologi, politik dan hukum. Hanya saja pada kurikulum tahun 2004, mata pelajaran sejarah disatukan dengan pendidikan kewarganegaraan. Namun pada kurikulum selanjutnya yaitu kurikulum tahun 2006, sejarah dikembangkan secara terpisah dengan pendidikan kewarganegaraan. Perubahan yang cukup signifikan dalam pengembangan Pendidikan IPS melalui kurikulum tahun 2004 dan 2006 adalah dimasukkannya kajian tentang masyarakat multikultural, pendekatan ilmu teknologi dan masyarakat serta pendekatan kemasyarakatan dalam menghadapi persaingan di era globalisasi.

IPS dalam Kurikulum 2013 dibagi menjadi 2 tingkatan, yaitu untuk kelas 1–3 SD (kelas rendah): IPS tidak diajarkan sebagai mata pelajaran terpisah, melainkan terintegrasi dalam pembelajaran tematik bersama mata pelajaran lain (Bahasa Indonesia, PPKn, SBdP, dll). Sedangkan untuk kelas 4–6 SD (kelas tinggi): IPS menjadi mata pelajaran tersendiri, tetapi tetap diajarkan dalam pendekatan tematik terpadu, artinya tema-tema pembelajaran tetap mengintegrasikan beberapa mata pelajaran dengan fokus tertentu. Materi IPS dalam Kurikulum 2013 mencakup 4 disiplin ilmu utama; (1) Geografi – wilayah, lingkungan, dan interaksi manusia dengan ruang; (2) Sejarah – peristiwa masa lalu yang berpengaruh terhadap kehidupan sekarang; (3) Ekonomi – kebutuhan manusia, kegiatan ekonomi, dan pengelolaan sumber daya; (4) Sosiologi/Antropologi – kehidupan sosial, nilai, norma, dan kebudayaan. Contoh materi pada kelas 4: Peta dan lingkungan sekitar, pekerjaan penduduk, kebudayaan Indonesia; Kelas 5: Keragaman sosial budaya, kegiatan ekonomi, sejarah perjuangan bangsa; Kelas 6: Perkembangan teknologi, globalisasi, kerjasama antarnegara ASEAN.

Ciri Khas Pembelajaran IPS dalam Kurikulum 2013, yaitu (1) Tematik Terpadu: Pembelajaran IPS tidak berdiri sendiri, tapi dikaitkan dengan tema yang relevan. (2) Berbasis karakter: Menanamkan nilai seperti nasionalisme, gotong royong, toleransi. (3) Kontekstual dan lokal: Materi dikaitkan dengan lingkungan dan kehidupan nyata siswa. (4) Literasi dan HOTS: Meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi (analisis, evaluasi, kreasi).

Pada tahun 2021, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mulai memperkenalkan Kurikulum Merdeka. Posisi IPS dalam Kurikulum Merdeka SD yaitu untuk kelas 1–3 SD: IPS tidak berdiri sebagai mata pelajaran tersendiri, tetapi menjadi bagian dari pembelajaran tematik atau kontekstual. Fokus utama adalah penguatan nilai sosial, budaya, dan lingkungan sekitar. Kelas 4–6 SD: IPS menjadi mata pelajaran tersendiri, namun dengan pendekatan inquiry, berbasis konteks lokal, dan berpusat pada murid.

Dalam Kurikulum Merdeka, tidak lagi menggunakan KI & KD, melainkan diganti dengan Capaian Pembelajaran (CP). Untuk IPS, CP dibagi dalam fase yaitu Fase A (kelas 1–2): Terintegrasi dalam tematik → pengenalan lingkungan sosial dan budaya sekitar. Fase B (kelas 3–4): Pengenalan struktur sosial sederhana, peta dan ruang, sejarah lokal. Fase C (kelas 5–6): Mulai menganalisis kehidupan sosial, ekonomi, sejarah perjuangan, dan keterkaitan wilayah Indonesia dengan dunia.

Dalam Kurikulum Merdeka, IPS memiliki peran penting dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. IPS dapat menjadi sarana untuk mengembangkan kecintaan peserta didik terhadap kebudayaan lokal, yang merupakan bagian dari kebinekaan global. IPS juga dapat menjadi media untuk mengajarkan nilai-nilai Pancasila, seperti persatuan, kerukunan, kemanusiaan, demokrasi, dan keadilan. IPS juga dapat menjadi stimulus untuk menumbuhkan rasa ingin tahu, kritis, dan kreatif peserta didik dalam menyelesaikan masalah sosial yang ada di lingkungan mereka. Pentingnya Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dalam Konteks Pendidikan antara lain IPS memberikan pemahaman yang mendalam tentang struktur, dinamika, dan nilai-nilai masyarakat. Ini membantu peserta didik mengembangkan wawasan sosial dan keterlibatan dalam konteks masyarakat tempat mereka tinggal. Mata pelajaran IPS melibatkan analisis terhadap peristiwa sejarah, geografi, ekonomi, dan politik. Hal ini mengasah keterampilan analisis kritis peserta didik yang memungkinkan mereka menjadi pemikir yang kritis dan reflektif. Mata pelajaran IPS membantu peserta didik memahami keterkaitan antara berbagai isu global. Hal ini penting dalam mempersiapkan generasi muda untuk berperan dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, kemiskinan, dan konflik internasional. IPS membantu membentuk warga negara yang aktif dan berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi. Peserta didik diajak untuk memahami hak dan kewajiban mereka dalam masyarakat.

Memperhatikan disiplin-disiplin ilmu sosial yang dikembangkan dalam kurikulum pendidikan IPS di Indonesia maka kita dapat menyimpulkan bahwa tradisi pengembangan pendidikan IPS di Indonesia biasanya terdiri dari disiplin ilmu ekonomi, sejarah, geografi, sosiologi, politik, hukum dan pendidikan kewarganegaraan. Apabila kita bandingkan dengan tradisi social studies di Amerika Serikat maka disiplin ilmu sosial yang dikembangkan dalam social studies lebih beragam bila dibandingkan dengan tradisi pendidikan IPS di Indonesia. Disiplin ilmu sosial yang dikembangkan dalam social studies di Amerika Serikat meliputi antropologi, arkeologi, ekonomi, geografi, sejarah, hukum, filsafat, ilmu politik, psikologi, religi dan sosiologi. Selain itu bidang ilmu lain yang dianggap memiliki relevansi dan dapat mendukung pengembangan social studies seperti ilmu kemasyarakatan, matematika dan ilmu-ilmu kealaman menjadi bagian dari kajian social studies.

Meskipun demikian, disiplin ilmu sosial yang dikembangkan dalam pendidikan IPS di Indonesia dianggap dapat mewakili pencapaian tujuan yang diharapkan. Pengembangan pendidikan IPS yang ditujukan sebagai pembentukan kewarganegaraan dapat dikembangkan melalui pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan serta sejarah. Pengembangan pendidikan IPS sebagai ilmu sosial yang merujuk pada pengembangan segi keilmuan sosial itu sendiri dapat diwakili oleh beberapa disiplin ilmu seperti geografi, ekonomi, sejarah, sosiologi, dan antropologi.

E. Penilaian dalam Pembelajaran IPS

Penilaian menurut Anastasi (1982: 1) adalah "a systematic process of determining the extend to wich instuctional objectives are achieved by pupil". (Proses sistematis yang menekankan pada tujuan pembelajaran yang dicapai oleh siswa). Senada dengan hal tersebut, Frazee dan Rudnitski (1995: 271) mengatakan: *"Assessment of student learning has evolved into a central position in the teaching and learning process"*. (Penilaian hasil belajar siswa telah meningkatkan ke dalam suatu titik pusat antara guru dan proses pembelajaran). Lebih lanjut, dikatakan *"Assesment, however, is useful when used in the proper context and for the appropriate purpose"*. (Penilaian, bagaimanapun, adalah bermanfaat ketika digunakan untuk mengukur kesesuaian dengan tujuan pembelajaran). Dengan demikian, penilaian dapat menyediakan informasi penting untuk meningkatkan tiap-tiap aspek pendidikan, menurut Mitchell (dalam Frazee dan Rudnitski, 1995: 273) disebutkan ada empat tujuan utama penilaian, yaitu : 1) untuk memberikan informasi tentang hasil pelajaran siswa kepada guru dan siswa, 2) untuk pencapaian tujuan dan peningkatan pembelajaran, 3) untuk pengambilan keputusan yang mempengaruhi masa depan siswa, 4) sebagai wujud tanggung jawab kepada pimpinan.

Menurut Sudjana (2006: 2), "Kegiatan penilaian adalah suatu tindakan atau kegiatan untuk melihat sejauh mana tujuan- tujuan instruksional telah dapat dicapai atau dikuasai oleh siswa dalam bentuk hasil-hasil belajar yang diperlihatkannya setelah mereka menempuh pengetahuan belajarnya (proses belajar mengajar)". Lebih lanjut, pengertian penilaian juga dikatakan oleh Zainul, dan Nasution (2005: 8), "Penilaian adalah suatu proses untuk mengambil keputusan dengan menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran hasil belajar baik yang menggunakan instrumen tes maupun nontes". Jadi, maksud penilaian adalah memberi nilai tentang kualitas sesuatu. Tidak hanya sekedar mencari jawaban terhadap pertanyaan tentang apa, tetapi lebih diarahkan kepada menjawab pertanyaan bagaimana atau seberapa jauh sesuatu proses atau suatu hasil yang diperoleh seseorang atau suatu program. Lebih lanjut dikatakan Zainul, dan Nasution (2001: 8) bahwa "Penilaian di sini diartikan sebagai padanan kata evaluasi".

Depdiknas (2004: 12) memberikan batasan, "Penilaian adalah penerapan berbagai cara dan penggunaan beragam alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil belajar siswa atau ketercapaian kompetensi (rangkaiannya kemampuan) siswa. Penilaian menjawab pertanyaan tentang sebaik apa hasil atau prestasi belajar seseorang".

Dari beberapa pengertian penilaian di atas dapat disimpulkan bahwa penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar siswa yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan.

Adapun pemilihan bentuk penilaian dapat berupa : penilaian tertulis (paper and pencil test), hasil karya (product), unjuk kerja (performance), penugasan (project), dan kumpulan hasil kerja siswa (portofolio), dengan memperhatikan kemampuan-kemampuan yang dapat mendorong kemampuan penalaran dan kreativitas siswa serta sesuai dengan ciri khas dari mata pelajaran yang bersangkutan (dalam hal ini mata pelajaran IPS). Senada dengan hal tersebut di atas Etin Solihatini dan Raharjo (2007: 43) mengatakan bahwa "Dewasa ini, pelaksanaan evaluasi IPS telah mengalami perluasan. Penekanan secara khusus diarahkan pada apa yang disebut sebagai keterampilan dasar (basic skills), yang meliputi keterampilan membaca bermakna, menulis, dan keterampilan matematis. Keterampilan dasar ini merupakan minimum competency testing in social studies (kompetensi minimal dalam pengujian IPS). Perhatian dan penekanan lebih jauh, pada apa yang dinamakan *the day to day evaluation of children's work* (evaluasi hasil karya siswa)". Dalam evaluasi jenis ini, yang sangat ditekankan adalah aspek informalitas prosedural dalam pengevaluasian. Dengan kata lain, evaluasi atau penilaian dalam pencapaian kompetensi belajar IPS harus menerapkan prinsip keseimbangan antara formal tes dan nonformal tes dengan alat evaluasi tes dan nontes.

Lebih lanjut, dikatakan oleh Mulyasa (2006: 38) bahwa kompetensi yang harus dikuasai peserta didik perlu dinyatakan sedemikian rupa agar dapat dinilai, sebagai wujud hasil belajar peserta didik yang mengacu pada pengalaman langsung. Penilaian terhadap pencapaian kompetensi perlu dilakukan secara objektif, berdasarkan kinerja peserta didik, dengan bukti penguasaan mereka terhadap pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap sebagai hasil belajar. Dengan demikian dalam pembelajaran yang dirancang berdasarkan kompetensi, penilaian tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan yang bersifat subjektif tetapi dilakukan secara objektif.

Beberapa kriteria atau hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penilaian sebagai berikut.

1. Penilaian harus mencakup tiga aspek kemampuan, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
2. Menggunakan berbagai cara penilaian pada waktu kegiatan belajar sedang berlangsung, misalnya mendengarkan, observasi, mengajukan pertanyaan, mengamati hasil kerja siswa, dan memberikan tes.
3. Pemilihan cara dan bentuk penilaian berdasarkan atas tuntutan kompetensi dasar.
4. Mengacu kepada tujuan dan fungsi penilaian, misalnya pemberian umpan balik, pemberian informasi kepada siswa tentang tingkat keberhasilan belajarnya, dan memberikan laporan kepada orang tua.
5. Mengacu kepada prinsip diferensiasi, yakni memberikan peluang kepada siswa untuk menunjukkan apa yang diketahui, yang dipahami, dan mampu dilakukannya.
6. Tidak berlaku diskriminatif (tidak memilih-milih mana siswa yang berhasil dan mana yang gagal dalam menerima pembelajaran (Depdiknas, 2004: 20)